

# PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi empiris Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2017-2021)

Arif Syafitra<sup>1</sup>, Dwi Fitri Puspa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa, <sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta

E-mail: [arifsyafitra122@gmail.com](mailto:arifsyafitra122@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Produk Domestik Bruto terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Data Panel dengan program *Eviews12* dan tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga besar kecilnya penerimaan dana alokasi umum atau dan alokasi khusus pengaruhnya terhadap belanja daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, produk domestik regional bruto, belanja daerah, *Eviews12*

## PENDAHULUAN

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran (Dedi Nordiawan, 2007). Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No. 12 Tahun 2019).

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Halim, 2007).

Pengeluaran dan penerimaan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Wance, 2019). APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja

daerah biasanya direalisasikan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan untuk belanja modal (Sagala & Malau, 2023).

Fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Barat adalah adanya masalah yang terjadi didalam pengelolaan keuangan. Dimana masih banyak realisasi belanja daerah yang belum mencapai target dari anggaran belanja daerah yang telah disepakati.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama sedangkan agen sebagai pihak yang terkait atas kontrak perjanjian. Pihak prinsipal yaitu pihak yang membuat tugas suatu kontrak dan memberikan perintah atas kontrak

tersebut. Sedangkan pihak agen yang menerima dan menjelaskan perintah kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal. Hubungan keagenan dengan belanja daerah adalah pada pemerintah menjalankan berdasarkan peraturan dan bukan hanya untuk mematuhi kepentingan prinsipal saja, dalam *agency theory* yang menjadi prinsipal disini adalah pemerintahan pusat sedangkan yang menjadi agen adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan mengatur anggaran belanja daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari prinsipal dan agen harus sama, agar terciptanya kesejahteraan bersama.

### METODE PENELITIAN

Populasi mengacu kepada seluruh kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peniliti investigasi (Sekaran, 2014). Oleh karena itu, populasi yang diambil dalam penelitian secara keseluruhan kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota bahwasanya berdasarkan pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan dimana keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013) jadi sampel dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah. Data yang diperoleh adalah publikasi tahunan dari BPS Sumatera Barat dan Kementerian Keuangan yang dapat diakses di website resmi <https://sumbar.bps.go.id/> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

Dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dan mentabulasikan data menggunakan *miccrosoft excel* dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu software *evIEWS12*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel Penelitian	Koef. Regresi	Prob	keputusan
(constant)	2.19E+11	0.0329	
Pendapatan Asli Daerah	0.089195	0.4209	H1 ditolak
Dana Bagi Hasil	-	0.6702	H2 ditolak
Dana Alokasi Umum	0.185240	0.0000	H3 diterima
Dana Alokasi Khusus	1.089343	0.0000	H4 diterima
Produk Domestik Regional Bruto	0.959519	0.0000	H5 ditolak
R- Square		0.9930	
Prob (F-Statistic)		0.007	

Sumber: *Data sekunder olahan Eviews12*

Dari tabel 1. diatas dapat kita lihat bahwa nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,99. Hal ini menjelaskan bahwa variabel – variabel independen serta variabel pada penelitian ini menjelaskan kontribusinya dalam mempengaruhi belanja daerah adalah sebesar 99,3%, sedangkan 0,7% belanja daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Nilai prob F yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,0000, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa prob F (0,000) <  $\alpha$  (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Pada tahapan pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,09 dengan nilai *probability* sebesar 0.4209 >  $\alpha$ = 0,05. Maka keputusannya adalah variabel pendapatan asli daerah diketahui tidak adanya pengaruh terhadap belanja daerah.

Pada tahapan pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel dana bagi hasil diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,18 dengan nilai *probability* sebesar 0.6702 >  $\alpha$ = 0,05. Maka keputusannya adalah variabel dana bagi hasil diketahui tidak adanya pengaruh terhadap belanja daerah.

Pada tahapan pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan variabel dana alokasi umum diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,09 dengan nilai *probability* sebesar  $0.0000 < \alpha = 0,05$ . Maka keputusannya adalah variabel dana alokasi umum diketahui berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pada tahapan pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan variabel dana alokasi khusus diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,95 dengan nilai *probability* sebesar  $0.0000 < \alpha = 0,05$ . Maka keputusannya adalah variabel dana alokasi khusus diketahui berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pada tahapan pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan variabel produk domestik regional bruto diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,000190 dengan nilai *probability* sebesar  $0.8 > \alpha = 0,05$ . Maka keputusannya adalah variabel produk domestik regional bruto diketahui tidak adanya pengaruh terhadap belanja daerah.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada 19 Kabupaten/ kota di Sumatera Barat 2017 – 2021.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran untuk penelitian sebelumnya. Pertama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan periode tahun amatan yang lebih panjang dan memperluas sampel penelitian tidak hanya menggunakan 19 Kabupaten/kota saja agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasi. Kedua, Pada penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dedi Nordiawan, 2007 *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta ; Salemba Empat
- Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sagala, M. S., & Malau, Y. N. (2023). Pengaruh PDRB, Dana Bagi Hasil dan Investasi terhadap Belanja Daerah Di

Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12(1), 12–26.

Wance, Marno. (2019). Dinamika perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) buru selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1)